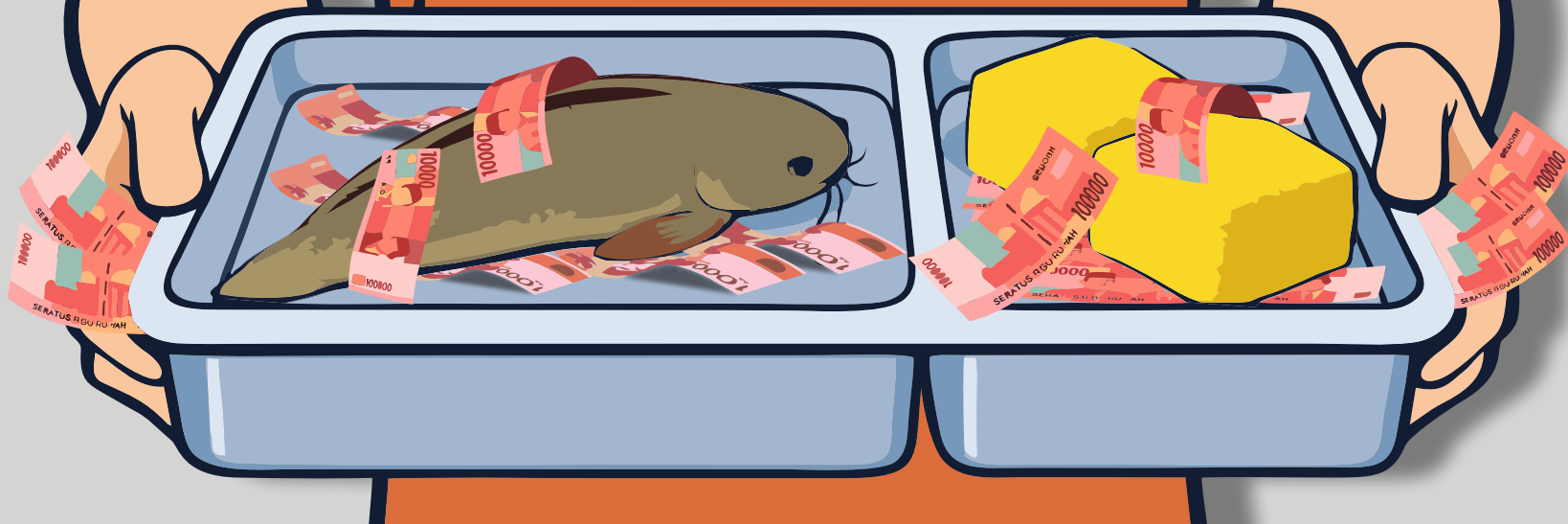




EDISI RABU 11 MARET 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

MBG LEPAS KENDALI, APBN DIGUGAT

GUGATAN

UU APBN 2026 KE MK

Pemohon

- Busyro Muqoddas (mantan pimpinan KPK)
- Sejumlah organisasi masyarakat sipil. Didampingi pengacara publik LBH Jakarta

Jenis Gugatan

- Uji materi (judicial review) UU APBN 2026
- Didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (10/3/2026)

Pokok Persoalan

- APBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp769 triliun untuk anggaran pendidikan
- Penjelasan pasal memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari pendanaan penyelenggaraan pendidikan.

Ketika anggaran negara seharusnya menjadi jangkar di tengah badai, justru kini terseret pusaran polemik program pemerintahannya sendiri. Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil mengajukan uji materi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (10/3/2026). Gugatan yang salah satunya diajukan mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas itu dipicu kekhawatiran atas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai semakin lepas kendali. Polemik program ini juga mencuat di berbagai lini. Terbaru, muncul laporan menu makanan bermasalah, salah satunya sajian ikan mentah. Di sisi lain, alokasi dana jumbo untuk MBG disebut-sebut ikut menggerus porsi anggaran pendidikan. Dari sisi nominal anggaran, apa yang diterima masyarakat menurut MBG Watch jauh dari hitungan ideal. Dengan dana total MBG Rp335 triliun, jika dibagi ke seluruh penduduk, setiap orang akan memperoleh sekitar Rp361 ribu per bulan. Namun bila difokuskan kepada masyarakat miskin, satu keluarga seharusnya bisa memperoleh sekitar Rp66 juta per tahun atau sekitar Rp5,2 juta per bulan. Kenyataannya, keluarga miskin disebut hanya menerima sekitar Rp200 ribu per bulan dari program tersebut. Di sisi lain, gugatan itu muncul di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Ketika APBN dituntut tampil kuat sebagai penopang stabilitas ekonomi dan perlindungan bagi masyarakat. **BACA HAL 11...**

Ketentuan yang Digugat

- Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026
- Penjelasan Pasal 22 ayat (3)

Alasan Gugatan

- MBG dinilai tidak terkait langsung dengan pendidikan.
- Diduga terjadi pengalihan anggaran pendidikan untuk program prioritas pemerintah.
- Tata kelola MBG dinilai bermasalah dan berpotensi membebani fiskal negara.

KATEGORI BELANJA

TERBESAR (BGN) 2025

- | | |
|---|--|
| • Kendaraan
Rp1.39 Triliun | • Pakaian
Rp622.3 Miliar |
| • SPPG
Rp1.26 Triliun | • Pelatihan & Sosialisasi
Rp464.6 Miliar |
| • Perangkat Keras & Komputer
Rp830.1 Miliar | • Makanan
Rp242.8 Miliar |

02

GOVERNMENTTODAY
Harga Minyak Mentah
Indonesia Naik

04

NUSANTARA
Tak Hanya Bupati, KPK Juga
Tangkap Wakil Bupati Rejang Lebong

10

LISTSTYLE
Sepatu Stylish yang Nyaman
Dipakai Ngabuburit Sehari

Penetapan harga tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 115.K/MG.03/MEM.M/2026 mengenai Harga Minyak Mentah Bulan Februari 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menjelaskan bahwa kenaikan ICP dipicu oleh sejumlah faktor yang berkembang di pasar minyak global. Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Kenaikan ICP pada Februari 2026 dipengaruhi oleh berbagai perkembangan di pasar minyak dunia. Salah satunya adalah meningkatnya risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu pasokan minyak global. Ketegangan tersebut memicu berbagai respons kebijakan serta aktivitas militer di kawasan strategis, termasuk

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA NAIK

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Februari 2026 tercatat sebesar US\$ 68,79 per barel. Angka ini menunjukkan kenaikan US\$ 4,38 per barel dibandingkan harga pada Januari 2026 yang berada di level US\$ 64,41 per barel.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

latihan militer di wilayah perairan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada jalur distribusi energi dunia," ujar Laode dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026).

Selain itu, serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas energi di Rusia juga turut memperkuat sentimen

pasar terkait potensi gangguan pasokan minyak dunia. Laode menambahkan bahwa selain faktor geopolitik, dinamika harga minyak juga dipengaruhi oleh kondisi pasokan minyak secara global.

Ia mengungkapkan bahwa laporan dari International Energy Agency (IEA)

menunjukkan adanya penurunan produksi minyak dunia pada awal tahun 2026, termasuk penurunan produksi dari negara-negara yang tergabung dalam OPEC+. Kondisi tersebut menyebabkan keseimbangan pasokan minyak di pasar global menjadi semakin ketat.

"Penurunan produksi global tersebut ikut berkontribusi terhadap semakin terbatasnya pasokan minyak di pasar internasional," tambahnya.

Selain faktor tersebut, kenaikan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh berkurangnya stok produk minyak di Amerika Serikat. Penurunan cadangan tersebut mencerminkan meningkatnya konsumsi energi serta tingginya aktivitas ekonomi.

Di kawasan Asia Pasifik, pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pengolahan minyak di Singapura. Tercatat throughput minyak mentah Singapura mengalami kenaikan sebesar 1% secara bulanan (month to month/mom) pada akhir Februari 2026 sehingga mencapai 89% dari total kapasitas 1,12 juta barel per hari (bph).

Selain itu, China juga meningkatkan cadangan minyak strategisnya hingga 1 juta barel. Langkah tersebut turut memperketat fundamental pasar minyak mentah dari sisi keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik sampai dengan Hari Raya Idul Fitri meskipun harga minyak mentah dunia melonjak hingga sempat melampaui 100 dolar AS per barel.

Bahlil, saat ditemui sebelum mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/3/2026) menjelaskan dirinya telah membicarakan masalah subsidi itu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Pemerintah, kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, saya dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM, sampai dengan Hari Raya (Idul Fitri) Insyaallah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi, negara hadir untuk memastikan bahwa sekali pun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tetapi untuk subsidi tetap sama, tidak ada kenaikan harga, untuk minyak subsidi ya," kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan. (tin, ant, rls/dya)

HARGA RATA-RATA MINYAK MENTAH PADA FEBRUARI 2026 DIBANDINGKAN JANUARI 2026

- Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik US\$ 4,38 per barel, dari US\$ 64,41 per barel menjadi US\$ 68,79 per barel
- Brent (ICE) meningkat US\$ 4,64 per barel, dari US\$ 64,73 per barel menjadi US\$ 69,37 per barel
- WTI (Nymex) naik US\$ 4,26 per barel, dari US\$ 60,26 per barel menjadi US\$ 64,52 per barel
- Tanggal Brent bertambah US\$ 4,35 per barel, dari US\$ 66,80 per barel menjadi US\$ 71,15 per barel
- Basket OPEC meningkat US\$ 5,48 per barel, dari US\$ 62,31 per barel (per 30 Januari 2026) menjadi US\$ 67,79 per barel (per 26 Februari 2026).



PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara pastikan stabilitas harga kebutuhan pokok hingga kesiapan infrastruktur menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

"Rapat tersebut membahas stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, kelancaran distribusi logistik serta kesiapan infrastruktur dan layanan publik," tulis Sekretaris

Jelang Lebaran, Istana Pastikan Infrastruktur Siap dan Pangan Aman

Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Pembahasan tersebut, menurut Seskab Teddy untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, Kepala Negara menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke berbagai daerah," ungkap Seskab Teddy.

Kolaborasi antara kementerian dan lembaga dalam memastikan kesiapan berbagai aspek menjelang hari besar umat Islam tersebut menjadi bentuk nyata upaya dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. "Kesiapan sektor energi, transportasi, dan dukungan BUMN juga menjadi perhatian pemerintah," lanjutnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang

Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yulianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Melalui langkah koordinasi tersebut, pemerintah memastikan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merayakan hari kemenangan dengan khushuk dan penuh kebahagiaan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah Rp85.100 per kilogram (kg), sedangkan daging ayam ras Rp40.800 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa

Pembahasan RUU Pemilu di DPR

DIUSULKAN KPU JADI CABANG KEKUASAAN KE-4

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diusulkan diposisikan sebagai cabang kekuasaan negara keempat. Artinya, di luar eksekutif, legislatif dan yudikatif guna menjamin independensi penyelenggara pemilu. Hal itu diungkap saat Komisi II DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama tiga pakar hukum tata negara membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Selasa (10/3/2026).

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai langkah ini krusial agar KPU tidak berada di bawah pengaruh lembaga negara yang juga menjadi peserta kontestasi politik.

“Bisa enggak kita bayangkan bahwa KPU itu cabang kekuasaan nomor empat? Eksekutif, legislatif, yudikatif, nah ini cabang keempat,” kata Jimly dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ia menegaskan, independensi mutlak diperlukan karena Presiden dan DPR merupakan peserta pemilu, sementara lembaga peradilan bertugas mengadili sengketa. KPU, menurut Jimly, tidak boleh tunduk pada salah satu cabang kekuasaan tersebut.

“Maka KPU itu tidak boleh tunduk di bawah pengaruh Presiden, karena



Komisi II DPR menggelar RDPU dengan pakar hukum yakni Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, hingga Refly Harun, untuk membahas revisi UU Pemilu, Selasa (10/3/2026). (ist)

Presiden itu peserta pemilu. DPR peserta pemilu. Cabang kekuasaan kehakiman mengadili proses dan hasil pemilu,” ujarnya.

Selain reposisi lembaga, Jimly mengusulkan perubahan mekanisme

rekrutmen anggota KPU. Ia menyarankan sistem masa jabatan berbasis periode diubah menjadi berbasis usia, serupa dengan masa jabatan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

PASAL KRUSIAL UU PEMILU YANG DISOROTI

- **Ambang Batas Pencalonan**
Revisi diperlukan setelah putusan MK yang menghapus presidential threshold dan mendorong penataan ulang ambang batas pencalonan serta sistem pemilu.
- **Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal**
MK mengarahkan pemisahan Pemilu Nasional (Pilpres-Pileg) dan Pemilu Lokal (Pilkada) untuk mengurangi beban penyelenggara.
- **Penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu)**
Revisi menekankan penguatan independensi, perbaikan sistem rekrutmen sebelum tahapan pemilu, serta perlindungan bagi pengawas ad hoc.
- **Integritas dan Biaya Politik**
Didorong aturan lebih tegas untuk mencegah politik uang dan meningkatkan transparansi pendanaan politik.
- **Kualitas Caleg**
Muncul usulan agar partai lebih selektif merekrut calon legislatif, tidak hanya figur populer tanpa kapasitas politik.
- **Penggantian Calon Terpilih**
Mekanisme pergantian calon terpilih oleh partai dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan sengketa konstitusional.
- **Masa Jabatan Ketua Umum Partai**
Ada usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai sebagai bagian dari reformasi sistem politik.



Mahfud MD Harap Revisi Selesai Tahun Ini

DUA mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, mendorong agar revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Dorongan tersebut disampaikan keduanya dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mahfud menyatakan sependapat dengan pandangan Jimly bahwa proses revisi UU Pemilu sebaiknya dirampungkan pada tahun ini. Menurut dia, aturan baru terkait pemilu idealnya sudah tersedia paling lambat Maret 2027.

Ia menjelaskan tahapan pemilu, khususnya proses pendaftaran peserta, tidak dapat dilakukan secara mendadak. Karena itu, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya harus disiapkan jauh hari sebelumnya.

“Paling lambat Maret 2027 seharusnya undang-undang itu sudah selesai. Tidak mungkin proses pendaftaran tahapan pemilu dimulai, sementara undang-undangnya baru disahkan, misalnya pada Mei. Itu akan sangat berat,” ujar Mahfud dalam

paparnya.

Dikatakan Mahfud revisi tidak bisa dilakukan secara mendadak karena berpotensi mengganggu tahapan pemilu.

Menurut Mahfud, pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tahapan awal pemilu biasanya sudah dimulai sejak pertengahan tahun, termasuk proses pendaftaran partai politik.

“Oleh sebab itu, tidak bisa dibuat dadakan, Itu nanti akan masih mendapat akan ada judicial review dan sebagainya itu harus diantisipasi sehingga jelas dari awal,” kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ia menegaskan, penyusunan undang-undang ke pemilu harus dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai agar tidak menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya.

Mahfud mencontohkan, tidak tepat apabila tahapan pendaftaran partai politik sudah dimulai pada Juni, sementara undang-undang yang menjadi dasar hukumnya baru disahkan pada waktu yang sangat berdekatan.

“Ketika pendaftaran itu sudah jelas, akuratnya begini, tidak bisa misalnya kita berpikir, sudahlah undang-undang Pilkada itu kan masih dua setengah tahun kemudian, tidak bisa begitu,” ujarnya.

Mahfud menambahkan, perubahan aturan yang dilakukan secara terburu-buru juga berpotensi memicu persoalan hukum baru, termasuk gugatan terhadap undang-undang tersebut.

Karena itu, Mahfud menilai pembahasan revisi regulasi ke pemilu sebaiknya diselesaikan lebih awal agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan jelas dan terukur.

Pada kesempatan yang sama, Jimly juga menyampaikan harapannya agar revisi UU Pemilu dapat dirampungkan tahun ini. Ia menilai jika pembahasan baru selesai tahun depan, maka waktunya akan terlalu mepet dengan penyelenggaraan Pemilu 2029.

“Saya mendukung agar ini bisa selesai tepat waktu. Idealnya memang tahun ini sudah terbentuk. Kalau baru tahun depan selesai, maka 2027 sudah terlalu dekat dengan 2029,” kata Jimly. (tin,ist/dya)

Tujuannya agar komisioner tidak terpengaruh dinamika politik lima tahunan. Jimly mengusulkan batas usia minimal komisioner KPU pusat di kisaran 45 hingga 50 tahun, dengan usia pensiun 65 hingga 70 tahun. Ia berharap posisi tersebut diisi sosok yang matang dan tidak lagi memiliki ambisi politik praktis.

“Maka kalau menurut saya KPU terutama yang pusat itu harus sudah matang. Jangan lagi punya cita-cita,” jelas Jimly.

Ia juga menekankan pentingnya rekam jejak yang bersih dari partai politik setidaknya beberapa tahun sebelum menjabat. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan KPU berada di posisi netral demi menjaga kualitas demokrasi. (wid ist,kum/dya)

Komentari Kepala Daerah Izin Umrah Jelang Mudik MENDAGRI TITO: MELAYANI RAKYAT IBADAH

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap siaga dan berada di daerah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan banyak kepala daerah yang mengajukan izin untuk melaksanakan ibadah umrah menjelang periode mudik Lebaran. Ia paham bahwa umrah adalah perjalanan ibadah.

"Saya tahu banyak juga yang minta izin ke saya untuk umrah. Ya saya pahami bahwa umrah itu ibadah, ibadah sunnah ya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Namun, Tito juga mengingatkan bahwa melayani masyarakat juga merupakan bagian dari ibadah,



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

terlebih dalam menjalankan tanggung jawab sebagai kepala daerah.

"Yang kedua, saya juga meyakini bahwa melayani rakyat ketika momentum seperti hari raya ini, kepala daerah ada di tempatnya dan melayani rakyatnya sehingga semua kegiatan rakyatnya berlangsung aman

dan lancar. Menurut saya itu juga adalah ibadah," ujarnya.

Tito juga menjelaskan terdapat sejumlah pengecualian bagi kepala daerah yang ingin bepergian ke luar negeri. Namun, hal tersebut hanya berlaku dalam kondisi tertentu seperti tugas negara atau alasan kesehatan.

"Ada pengecualian memang ya, iya ada pengecualiannya. Kalau misalnya ada tugas kenegaraan, misalnya Pak Presiden menugaskan. Kemudian juga ada yang kedua kalau pengobatan sakit yang memang harus dia untuk berobat, ya otomatis nanti wakilnya yang mengendalikan ya," jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan kepala daerah harus mematuhi aturan apabila ingin bepergian ke luar negeri. Jika melanggar ketentuan yang berlaku, sanksi dapat dijatuhkan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

"Sesuai aturan, kalau ke luar negeri tanpa izin, kan ada aturannya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dapat dikenakan, salah satunya dinonaktifkan selama tiga bulan," tegas Tito. Menurutnya, jabatan kepala daerah merupakan amanah sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi dan tanggung jawab. (wid,ist,kum/dya)

PANGLIMA TNI: SIAGA 1 HAL BIASA UNTUK UJI KESIAPAN PERSONEL



Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

(10/3/2026).

Agus menekankan istilah siaga 1 hal yang biasa dalam militer. Ia sudah memberlakukan status tersebut di tiap satuan sebagai bentuk reaksi cepat pasukan terhadap penanggulangan bencana.

"Siaga I itu kan istilah di militer, istilah yang biasa di militer. Saya sudah berlakukan siaga I tentunya di satuan-satuan itu pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Jadi tiap kodam itu satu batalyon siaga I apabila di wilayahnya ada bencana alam," ujarnya.

"Ya kita menguji kesiapsiagaan personel dan materil. Jadi hal yang biasa," lanjutnya.

Terkait konvoi kendaraan taktis TNI di Monas, Agus menekankan hal itu juga salah satu bentuk kesiapsiagaan. Dengan begitu, pihaknya bisa menghitung waktu pergerakan jika terjadi sesuatu di Jakarta.

"Itu menguji kesiapsiagaan

personel dengan materilnya. Itu kan dari wilayah-wilayah itu ke Jakarta berapa menit, kita hitung. Kalau terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan," ujarnya.

Agus mengatakan tidak ada rentan waktu pemberlakuan status siaga 1 tersebut. Ia menegaskan status tersebut hanya sebagai bentuk kesiapsiagaan pasukannya.

"Nggak ada, itu kan uji kesiapsiagaan itu, kalau sudah, kita cek, kita kembalikan lagi ke kesatuan," ujarnya.

Perintah status siaga 1 diketahui tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan Agus kepada jajarannya agar melaksanakan siaga tingkat 1 guna mengantisipasi perkembangan situasi dalam negeri akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah. TNI menyebut langkah ini ditempuh sesuai dengan tugas pokok TNI.

Adapun perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan penerapan siaga tingkat 1 merupakan tugas TNI dan telah diamanatkan oleh

UU TNI. Ia mengatakan perlindungan yang dimaksud adalah dari ancaman terhadap bangsa dan negara.

"Salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara," kata Brigjen Aulia saat dihubungi, Minggu (8/3).

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto menegaskan penetapan siaga tingkat 1 merupakan bagian dari Standard Operating Procedure (SOP) jelang Lebaran Idul Fitri. "Itu kan SOP rutin ya. Untuk menjaga kondusifitas seluruh rakyat dalam melaksanakan hari libur Lebaran. Mudik pulang kampung masing-masing ya," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/3/2026).

Aries menegaskan bahwa kegiatan itu salah satu upaya pengaman dari aparat untuk memastikan kegiatan libur keagamaan berjalan lancar. "Ya kan, mau Lebaran kan? Mau Lebaran biasa ya aparat menjaga untuk keamanan rakyat kan. Supaya liburannya ke kampung masing-masing dalam keadaan aman ya," lanjutnya. (wid,it/dya)

TAK HANYA BUPATI, KPK JUGA TANGKAP WAKIL BUPATI REJANG LEBONG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Hendri dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu. Operasi senyap ini mulai dilaksanakan pada Senin (9/3/2026). Dalam catatan, OTT di Bengkulu menjadi kali dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya di Semarang, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik bersama ajudan dan orang kepercayaannya pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan secara keseluruhan penyidik mengamankan 13 orang. Kemudian, KPK melakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu. Dari 13 orang tersebut, KPK membawa sembilan orang untuk melakukan pemeriksaan di DKI Jakarta.

"Dari 13 orang tersebut, selanjutnya tim membawa 9 orang di antaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta dan 9 orang tersebut saat ini sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong," ujar Budi kepada awak media, Selasa (10/3/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK menduga terdapat suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif hari ini, para pihak yang diamankan didalam terkait dengan konstruksi perkara tersebut.

Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, penyidik mengamankan



OTT KPK terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, pada Senin (9/3/2026) malam. (ist)

barang bukti, di antaranya dokumen dan barang bukti elektronik. Penyidik juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, meski belum dijelaskan nominalnya. Tak hanya itu, KPK juga melakukan penyegelan di beberapa ruang kerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk kebutuhan proses penyelidikan.

Terkait kasusnya, Bupati Fikri diduga terlibat dalam suap proyek

pengadaan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

"Saat ini kan yang dialami terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Bupati dan dari beberapa pihak swasta sebagai pelaksana proyek ya dalam konstruksi suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong tersebut," kata Budi Prasetyo.

KPK belum menjelaskan detail terkait konstruksi perkara yang

Eks Penyidik: Kepala daerah Tinggal Tunggu Waktu Saja Kapan Ditangkap

MANTAN Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harapan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa kepala daerah rawan ditangkap terkait kasus korupsi. "Kepala daerah itu tinggal nunggu waktu saja kapan ditangkapnya, apalagi jika integritasnya di titik nol," kata Yudi dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Anggota Kortas Polri itu mengatakan kerawanan ini disebabkan oleh individu kepala daerah tersebut. Selain rawan, juga ada kewenangan, keinginan, kuasa dan uang.

"Kebutuhan uang mereka yang tinggi karena ingin balik modal kampanye, hutang saat proses pilkada hingga memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditutup dengan gaji mereka," ujarnya.

Selain itu, kewenangan yang dimiliki kepala daerah terdapat pada

pengelolaan APBD, DAK, DAU termasuk mutasi, serta lelang jabatan serta menerima setoran.

OTT terhadap Bupati Pekalongan dan kini Bupati Rejang Lebong harusnya menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. Agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Hendaknya, kata Yudi, para kepala daerah menyadari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah yang terikat aturan hukum terutama tindak pidana korupsi.

Menurut Yudi, KPK harus menggalakkan OTT seperti ini sehingga membuat efek jera bagi kepala daerah lainnya.

"Pencegahan korupsi tidak akan efektif ketika kepala daerah dari awal menjabat memang berniat korup," katanya.

"Bahkan ada upaya pencegahan korupsi-pun mereka hanya pura-pura

saja mengikuti acara, sejatinya mereka hanya menjadi formalitas sebab korupsi mereka tetap berjalan," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

OTT kedua, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Madi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Madi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. (wid,ant/dya)



HARTA KEKAYAAN BUPATI REJANG LEBONG
MUHAMMAD FIKRI THOBARI

TOTAL KEKAYAAN
RP 19.53 MILIAR

Tanah dan bangunan
Rp 14.6 miliar

Kendaraan
Rp 900 juta

Harta bergerak lainnya
Rp 45 juta

Kas dan setara kas
Rp 7.23 miliar

Harta lainnya
Rp 9.7 miliar

Utang
Rp 12.94 miliar



HARTA KEKAYAAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG
HENDRI

TOTAL KEKAYAAN
RP 29.32 MILIAR

Tanah dan bangunan
Rp 22.1 miliar

Kendaraan
Rp 1.18 miliar

Harta bergerak lainnya
Rp 601 juta

Kas dan setara kas
Rp 3,2 miliar

Harta lainnya
Rp 6,5 miliar

Utang
Rp 4,3 miliar

menjerat Fikri. KPK akan menggelar jumpa pers hasil OTT di Rejang Lebong pada Rabu (11/3/2026) besok.

"Nanti kita akan dalam tentunya terkait dengan praktik-praktik pengadaan barang dan jasa tentunya di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, termasuk juga soal aliran uang, apakah juga ada pihak-pihak lain yang diduga melakukan penerimaan terkait dengan aliran uang proyek-proyek di Pemkab Rejang Lebong tersebut," jelasnya. (wid,tri,ist/dya)

SIDAK RELOKASI PASAR GADANG, DPRD MENYOAL SKEMA SWADAYA PEMBANGUNAN



Pembangunan tempat relokasi pedagang Pasar Induk Gadang, Kota Malang, Selasa (10/3/2026). (Santi/Lentera)

sebelumnya disebut dilakukan secara swadaya oleh para pedagang.

"Pembangunan sudah sekitar 90 persen. Temuan di lapangan tadi ada pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan ini akan kami dalam sebenarnya seperti apa skemanya," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji.

Menurut Bayu, setelah melihat langsung proses pembangunan di lapangan, DPRD menilai konsep swadaya yang dimaksud perlu diperjelas. Pasalnya, pemahaman awal dewan adalah para pedagang di sisi selatan pasar melakukan pembongkaran dan pembangunan lapak secara mandiri.

"Ternyata di lapangan pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga. Ini yang akan kami tindak lanjuti untuk mengetahui sebenarnya seperti apa skema swadaya yang dimaksud," jelasnya.

Terkait sumber pendanaan, Bayu menyebut pihaknya juga menerima informasi, di mana biaya pembangunan relokasi diperoleh dari penjualan bedak atau lapak kepada pedagang baru.

Nilai penjualan lapak relokasi ini disebut mencapai ratusan juta rupiah. Diduga digunakan untuk menutup biaya pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga.

"Informasi sementara sekitar Rp300 jutaan per bedak. Pedagang lama katanya gratis, tetapi ada sisa tanah yang dibangun baru dan itu yang dijual ke pedagang baru," ungkapnya.

Meski demikian, Bayu menegaskan informasi tersebut masih bersifat sementara dan perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Untuk itu, Komisi B DPRD Kota Malang berencana segera memanggil dinas terkait. Guna meminta penjelasan resmi mengenai skema pembangunan relokasi Pasar Gadang tersebut. "Secepatnya akan kami komunikasikan, nanti melalui Asisten II sebagai koordinator Diskopindag," katanya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi apabila ditemukan pelanggaran regulasi dalam proses pembangunan tersebut, Bayu menyatakan pihaknya belum dapat berkomentar lebih jauh. Sebelum mendapatkan penjelasan lengkap dari pemerintah daerah.

"Saya belum bisa komentar soal itu. Kami ingin meminta konfirmasi dulu ke dinas terkait agar mengetahui fakta lapangan secara lengkap. Ini yang akan menjadi bahan diskusi kami nanti, apakah secara regulasi diperbolehkan atau tidak," katanya.

Sebagai informasi, lokasi relokasi tersebut berada di sisi selatan Pasar Induk Gadang dan memiliki 2 status kepemilikan lahan. Sebagian merupakan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. (Santi/Dya)

PEMBANGUNAN KOPERASI MERAH PUTIH DI KABUPATEN MALANG DIKEBUT

MALANG- Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Malang terus dikebut. Hingga saat ini, puluhan gerai telah rampung dibangun dan sebagian di antaranya mulai beroperasi.

"Proses pembangunan KDKMP di Kabupaten Malang yang sudah 100 persen ada 20 unit. Sedangkan yang lainnya masih dalam proses," ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Kabupaten Malang, Tito Fibrianto Hadi Prasetya, Selasa (10/3/2026).

Dijelaskannya, secara keseluruhan terdapat 390 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Jumlah tersebut terdiri dari 378 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 12 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Menurut Tito, seluruh pembangunan gerai koperasi tersebut ditargetkan dapat rampung pada tahun 2026. Pemerintah daerah saat ini terus mendorong percepatan pembangunan agar seluruh koperasi desa memiliki fasilitas usaha yang

representatif.

Lebih lanjut, disebutkan sejumlah desa yang telah menuntaskan pembangunan gerai koperasi, di antaranya Desa Kedungpedaringan di Kecamatan Kepanjen, Desa Candirenggo dan Randuagung di Kecamatan Singosari, Desa Sukopuro di Kecamatan Jabung, Desa Karanganyar di Kecamatan Poncokusumo, Desa Ketindan di Kecamatan Lawang, serta Desa Bulupitu di Kecamatan Gondanglegi.

Untuk mendukung operasional koperasi, setiap desa atau kelurahan menurutnya diwajibkan menyiapkan lahan minimal seluas 1.000 meter persegi. Dari total luas lahan tersebut, sekitar 600 meter persegi dimanfaatkan untuk bangunan utama gerai, sementara 400 meter persegi lainnya difungsikan sebagai area parkir.

Tito menuturkan, desain bangunan gerai KDMP dibuat seragam sebagai standar nasional. Bangunan memiliki ukuran panjang sekitar 30 meter dan lebar 20 meter, dengan pembagian ruang yang telah ditentukan untuk menunjang berbagai

unit usaha koperasi.

"Bangunannya cukup besar, sehingga kantor koperasi juga bisa ditempatkan di sana," jelasnya.

Tito mengatakan, gerai tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai unit usaha koperasi sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing desa. Secara umum terdapat delapan jenis unit usaha yang dapat dikembangkan dalam program Koperasi Desa Merah Putih.

Unit usaha tersebut meliputi gerai penyediaan sembako, layanan obat murah, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik desa, cold storage atau gudang penyimpanan, distribusi logistik, hingga unit usaha lain yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun sebagian besar gerai



Ilustrasi: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar melakukan kunjungan di Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kecamatan Singosari. (dok. Prokopim Kab Malang)

masih dalam tahap pembangunan, kata Tito, beberapa koperasi desa di Kabupaten Malang telah mulai menjalankan aktivitas usahanya.

"Salah satunya adalah KDMP Randugading di Kecamatan Tajinan. Ini dijadikan sebagai mockup atau model percontohan pengembangan KDMP di daerah tersebut," katanya. (Santi/Dya)

PERTAMA DALAM 59 TAHUN, TARAWIH-IKTIKAF RAMADAN DI MASJID AL-AQSA DILARANG

Sejak perang Israel-AS melawan Iran dimulai pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026, pasukan keamanan Israel menutup seluruh Masjid Al-Aqsa. Siapa pun dilarang masuk, termasuk staf dan penjaga masjid. Situasi ini mencetak sejarah kelam baru, di mana untuk pertama kalinya sejak Israel menduduki wilayah Yerusalem pada tahun 1967, umat Islam dilarang secara total untuk mendirikan salat Tarawih dan melaksanakan ibadah iktikaf di dalam area Masjid Al-Aqsa.

Pasukan pendudukan Israel dilaporkan masih menutup akses kompleks Masjid Al-Aqsa selama 11 hari berturut-turut. Memblokade masuknya jemaah Muslim Palestina yang hendak melaksanakan ibadah di situs suci tersebut.

Otoritas Zionis berdalih bahwa langkah pemblokiran paksa ini dilakukan murni karena alasan keamanan menyusul eskalasi konflik militer terbuka yang sedang berlangsung dengan Iran.



Pasukan Israel memblokir masuknya jemaah Muslim Palestina yang hendak melaksanakan ibadah di situs suci tersebut. (Dok.ist)

Tindakan penutupan Masjid Al-Aqsa yang terus berlanjut hingga memasuki fase krusial sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadan ini dinilai telah menciptakan preseden yang

sangat berbahaya.

Merespons krisis kebebasan beribadah ini, Pemerintah Provinsi Yerusalem langsung mengeluarkan peringatan keras. Pihaknya

menyoroti adanya eskalasi hasutan berbahaya yang secara sistematis dipimpin oleh organisasi-organisasi ekstremis sayap kanan Israel, seperti kelompok aktivis Temple Mount (Bukit Bait Suci), terhadap keberadaan Masjid Al-Aqsa di tengah masa penutupan paksa yang sedang berlangsung.

Otoritas Palestina mencurigai bahwa momen perang dengan Iran hanyalah dimanfaatkan sebagai kedok oleh pemerintah Tel Aviv. Pihak Pemerintah Provinsi Yerusalem secara tegas menolak narasi keamanan sementara yang digaungkan oleh militer Israel sebagai alasan utama penutupan.

"Apa yang terjadi tidak dapat dianggap sebagai tindakan keamanan sementara, seperti yang diklaim otoritas penjajah, tetapi lebih merupakan agenda politik dan ideologis yang bertujuan untuk mengubah status quo keagamaan, sejarah, dan hukum yang ada di kompleks Masjid Al-Aqsa," tegas pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Yerusalem.

Penutupan ini menambah deretan panjang penderitaan warga Palestina yang kini harus menghadapi tekanan ganda yaitu ancaman kekerasan dari militer dan pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat dan Yerusalem, serta dampak geopolitik dari memanasnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang terus mengorbankan hak-hak dasar warga sipil.

Peneliti urusan Yerusalem, Ziad Ibhaies, menilai keputusan Israel menutup kompleks Masjid Al-Aqsa bukan sekadar langkah keamanan, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengubah status situs suci tersebut.

Dalam tulisannya yang diterbitkan Middle East Eye pada 6 Maret 2026, ia menyebut penutupan Al-Aqsa sebagai bentuk tindakan perang yang dilakukan secara bertahap.

Penutupan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir pekan lalu. Pada saat yang sama, Masjid Ibrahim di Hebron serta Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki juga ditutup. Pasukan pendudukan Israel mengusir para jemaah dari kedua masjid tersebut dan menyatakan penutupan dilakukan sebagai "langkah pencegahan" selama masa perang.

Namun menurut Ibhaies, alasan keamanan tersebut sulit dipercaya. Ia menilai kebijakan itu tidak memberikan perlindungan apa pun bagi warga Palestina. Di wilayah Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur, rumah-rumah warga Palestina tidak dilengkapi tempat perlindungan dari serangan udara, begitu pula fasilitas perlindungan umum hampir tidak tersedia. (wid,rls,ist/dya)

FAKTA MASJID AL AQSA

Masjid Al Aqsa bukan satu bangunan saja, melainkan sebuah kompleks seluas 144.000 m² di Kota Lama Yerusalem yang dapat menampung 400.000 jemaah.

- **Status Suci:** Tempat suci ke-3 umat Islam dan kiblat pertama sebelum Ka'bah. Juga disucikan oleh umat Yahudi dan Kristen.
- **Peristiwa Besar:** Lokasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS.
- **Arsitektur:** Dome of the Rock (Kubah Batu) merupakan model atap bulat pertama dalam arsitektur Islam.
- **Kompleks Utama:** Terdiri dari Masjid Al-Qibli (utama), Kubah Shakhrah, Musala Al-Marwani, Museum Islam, 12 gerbang, dan 4 menara.
- **Isu Terkini:** Status kepemilikannya masih menjadi isu sentral dalam konflik Israel-Palestina.



SEKRETARIAT Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk keras penutupan berkelanjutan Masjid Al-Aqsa oleh otoritas pendudukan Israel. Zionis disebut telah mencegah akses masuknya bagi para jemaah selama delapan hari berturut-turut.

OKI menggambarkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesucian tempat-tempat suci dan hak kebebasan beribadah, serta provokasi terhadap

OKI KUTUK PENUTUPAN OLEH ISRAEL

perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Sekretariat Jenderal OKI dikutip Selasa (10/3/2026), memperingatkan bahwa berlanjutnya pelanggaran dan serangan sistematis terhadap kota Yerusalem yang diduduki, dan tempat-tempat sucinya akan memicu siklus kekerasan dan ketegangan serta semakin menggoyahkan stabilitas kawasan tersebut.

Sebelumnya, Israel membatalkan ibadah sholat Jumat dan melakukan penutupan total seluruh situs suci di Kota Tua Yerusalem pada Jumat (6/3/2026). Penutupan tersebut dilakukan seiring terjadinya perang antara Iran dengan AS-Israel yang sudah berlangsung lebih dari sepekan.

Langkah drastis ini diumumkan oleh Kepala Administrasi Sipil Israel, Brigadir Jenderal Hisham Ibrahim. Ia beralasan, penutupan dilakukan demi keamanan menyusul rentetan serangan rudal balistik Iran yang menghujani Israel dalam beberapa hari terakhir. "Semua situs suci, termasuk Tembok Ratapan, Bukit Bait Suci (Al-Aqsa), dan Gereja Makam Kudus, akan tetap tertutup. Peziarah

dari agama apa pun tidak diizinkan masuk," kata dia seperti dilansir dari Al Jazeera.

Sejak agresi militer AS-Israel terhadap Iran pecah pada Sabtu lalu, Yerusalem Timur yang terjajah telah berubah menjadi benteng militer. Akses ke Kota Tua kini hanya terbatas bagi penduduk setempat dan pemilik toko. Meski demikian, bagi umat Islam, pembatasan ini terasa seperti luka yang diperdalam.

Syekh Ikrima Sabri, imam senior Masjid Al-Aqsa, mengecam keras kebijakan tersebut. "Otoritas pendudukan mengeksploitasi setiap kesempatan untuk menutup Al-Aqsa, dan ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya. Ironisnya, penutupan ini terjadi tepat ketika mediator Oman menyatakan bahwa kesepakatan nuklir dengan Teheran sebenarnya sudah "dalam jangkauan".

Masjid Al-Aqsa, yang mampu menampung hingga 500.000 jemaah, kini hanya menjadi saksi bisu ketegangan politik. Padahal, secara historis, kompleks ini dikelola oleh Yordania (Wakaf), namun akses fisiknya sepenuhnya dikendalikan oleh moncong senjata pasukan keamanan Israel. (wid,ist/dyq)

Kapan Waktu Terbaik untuk Berolahraga saat Berpuasa?



Menentukan waktu yang tepat untuk berolahraga saat puasa masih membingungkan. Sebagian orang memilih berolahraga sebelum berbuka, sementara yang lain setelah berbuka. Jadi kapan waktu yang paling aman?

Dokter spesialis penyakit dalam Vardian Mahardika menjelaskan, bahwa pemilihan waktu olahraga selama puasa bergantung pada jenis latihan dan kondisi tubuh kita.

Menurutnya, untuk latihan kardio seperti jalan cepat atau lari, waktu sebelum berbuka puasa justru dinilai cukup ideal.

"Kalau kita bicara soal lari atau jalan kaki, penelitian menunjukkan bahwa olahraga sebelum iftar atau sebelum berbuka puasa memiliki efek yang baik. Bahkan lebih bagus untuk membakar kalori dan memperbaiki metabolisme," kata Vardian dalam talkshow World Obesity Day.

Meski begitu, intensitas latihan tetap dijaga agar tidak berlebihan. Ia

menyarankan olahraga dilakukan di zona dua, yakni sekitar 60-70 persen dari denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia.

Dengan intensitas tersebut, pembakaran lemak dinilai lebih optimal tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Bahkan, olahraga sebelum berbuka juga disebut bisa memberi efek positif pada suasana hati.

"Ketika kita olahraga sebelum iftar, efeknya juga bisa menjadi anti depresan alami," ujar Vardian.

Berbeda dengan latihan kardio, olahraga angkat beban lebih dianjurkan dilakukan setelah berbuka puasa. Hal ini karena tubuh telah kembali mendapatkan asupan energi sehingga kemampuan saat berolahraga dapat lebih optimal.

"Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita sudah makan setelah puasa, hasilnya jauh lebih baik. Baik untuk kemampuan angkatan, progresif load, maupun metabolisme tubuh saat

latihan beban," jelasnya.

Meski begitu, Vardian menegaskan waktu berolahraga sebaiknya tetap menyesuaikan dengan aktivitas dan rutinitas masing-masing. Yang terpenting, masyarakat tetap menjaga tubuh agar tetap aktif bergerak selama menjalankan ibadah puasa.

Jeda Waktu Setelah Makan

Menanggapi anggapan bahwa olahraga pada malam hari setelah berbuka dapat memicu sakit perut, Vardian menjelaskan hal tersebut umumnya berkaitan dengan proses pengosongan lambung. Oleh karena itu, aktivitas fisik tidak disarankan dilakukan segera setelah menyantap makanan dalam porsi besar.

"Kalau kita beri jarak antara buka puasa dan olahraga, idealnya sekitar tiga jam. Sakit perut biasanya berkaitan dengan proses pengosongan lambung, jadi sebaiknya beri jeda sekitar satu sampai dua jam setelah makan sebelum mulai olahraga," jelasnya.

Ia menyarankan, jika ingin berolahraga lebih cepat setelah berbuka, sebaiknya membatalkan puasa terlebih dahulu dengan makanan ringan atau air minum. Setelah itu, beri jeda beberapa waktu sebelum memulai latihan agar tubuh lebih siap.

Selain itu, Vardian mengingatkan bahwa puasa tidak semata-mata dimaknai sebagai cara menurunkan berat badan secara cepat. Lebih dari itu, momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat.

"Bulan puasa sebenarnya adalah momentum untuk membangun hidup yang lebih baik dan kebiasaan yang lebih sehat," ujarnya.

Dengan demikian, kardio ringan hingga sedang dapat dilakukan sebelum berbuka dengan memperhatikan intensitas latihan. Sementara itu, latihan beban lebih ideal dilakukan setelah tubuh mendapatkan asupan energi. (Ella-Mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)

Tips Olahraga Saat Puasa

1. Pilih waktu yang tepat

Waktu terbaik berolahraga adalah setelah berbuka puasa saat tubuh kembali mendapat energi. Alternatif lainnya adalah 30-60 menit menjelang berbuka.

2. Sesuaikan jenis olahraga

Lakukan olahraga ringan hingga sedang seperti bersepeda, jogging, jalan santai, yoga, atau pilates. Hindari olahraga berat seperti HIIT jika waktu berbuka masih lama.

3. Jaga asupan makanan

Konsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, serat, dan mineral untuk menjaga energi dan kesehatan tubuh.

5. Penuhi kebutuhan cairan

Minum 1,5-2 liter air per hari untuk mencegah dehidrasi. Batasi aktivitas fisik berat di siang hari agar cairan tubuh tidak banyak hilang melalui keringat.

6. Cukupi waktu tidur

Orang dewasa membutuhkan tidur 7-9 jam per hari. Tidur yang cukup membantu pemulihan tubuh dan menjaga kebugaran selama berpuasa dan Tidur siang singkat.

Baterai Nuklir Mini China Diklaim Bertahan Setengah Abad Tanpa Charging

Baterai lithium-ion (Li-ion) yang digunakan pada berbagai perangkat elektronik umumnya memiliki masa pakai terbatas. Misalnya pada ponsel atau laptop, baterai biasanya hanya mampu bertahan sekitar satu hari sebelum perlu diisi ulang. Pada smartwatch, daya baterai bisa bertahan beberapa hari hingga beberapa minggu.

Sementara itu, baterai alkaline yang digunakan pada perangkat rumah tangga seperti remote televisi biasanya hanya mampu bertahan beberapa bulan.

Namun situasinya berbeda dengan baterai bertenaga nuklir bernama Betavolt BV100. Baterai yang dikembangkan perusahaan teknologi asal China pada 2024 ini diklaim mampu menghasilkan listrik hingga 50 tahun tanpa perlu pengisian ulang.

Ukuran baterai tersebut sangat kecil, bahkan lebih kecil dari koin, dengan dimensi sekitar 15 x 15 x 5 milimeter. Walaupun berukuran

mini, baterai ini dirancang untuk terus memproduksi listrik selama puluhan tahun. Daya yang dihasilkan sekitar 100 mikrowatt dengan tegangan 3 volt. Menurut perusahaan pengembangnya, BetaVolt, baterai BV100 memiliki kepadatan energi hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan baterai lithium-ion yang umum digunakan saat ini. Hal ini dimungkinkan karena sumber energinya berasal dari isotop radioaktif nickel-63.

Isotop tersebut secara alami akan mengalami peluruhan radioaktif dan berubah menjadi tembaga. Dalam proses peluruhan ini, partikel elektron dilepaskan. Elektron tersebut kemudian ditangkap oleh lapisan semikonduktor di dalam baterai dan diubah menjadi arus listrik.

Untuk menangkap elektron tersebut, BetaVolt menggunakan lapisan semikonduktor berbahan berlian yang sangat tipis. Lapisan ini berfungsi mengalirkan elektron sehingga

menghasilkan energi listrik yang stabil. Selama proses peluruhan radioaktif berlangsung, baterai akan terus memproduksi listrik.

Karena proses tersebut dapat berlangsung selama puluhan tahun, baterai nuklir jenis ini memiliki masa pakai jauh lebih lama dibandingkan baterai konvensional dan tidak memerlukan pengisian ulang.

Selain itu, baterai BV100 juga dirancang agar tetap berfungsi dalam kondisi lingkungan ekstrem. Perangkat ini diklaim mampu bekerja pada suhu antara -60 derajat Celsius hingga 120 derajat Celsius tanpa risiko terbakar ataupun meledak.

Dari sisi lingkungan, perusahaan menyebut teknologi ini relatif lebih ramah lingkungan. Isotop nickel-63 yang menjadi sumber energinya akan meluruh menjadi tembaga yang stabil, sehingga lebih mudah untuk didaur ulang dibandingkan baterai kimia biasa.

Meski terdengar futuristik, teknologi baterai nuklir sebenarnya bukan hal baru. Sejak dekade 1950-an, konsep ini telah digunakan untuk berbagai

keperluan khusus seperti pesawat luar angkasa, satelit, hingga stasiun penelitian otomatis di wilayah terpencil. Jenis baterai serupa juga pernah digunakan pada alat pacu jantung (pacemaker), karena mampu bekerja dalam jangka waktu sangat lama tanpa perlu diganti.

Namun demikian, baterai BV100 saat ini masih belum cukup kuat untuk digunakan pada perangkat seperti smartphone. Daya yang dihasilkan hanya sekitar 100 mikrowatt, jauh lebih kecil dibanding kebutuhan daya ponsel yang bisa mencapai ribuan milowatt, misalnya sekitar 40.000 milowatt ketika digunakan untuk video call.

Ilmuwan material dari University of Florida, Juan Claudio Nino, menjelaskan bahwa tingkat daya tersebut saat ini lebih cocok digunakan pada perangkat berdaya rendah seperti sensor nirkabel atau alat medis berukuran kecil. BetaVolt sendiri dilaporkan sedang mengembangkan versi yang lebih kuat.

Perusahaan tersebut menargetkan generasi berikutnya dari baterai nuklir ini mampu menghasilkan daya sekitar 1 watt.

Jika pengembangan teknologi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin di masa depan perangkat elektronik dapat menggunakan baterai yang mampu bertahan puluhan tahun tanpa perlu diisi ulang.

Meski demikian, penggunaan baterai nuklir pada perangkat konsumen masih menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama terkait aspek keamanan radiasi dan perlindungan bagi pengguna. Karena menggunakan bahan radioaktif, baterai seperti ini harus dilengkapi lapisan pelindung khusus agar radiasi yang dihasilkan tidak membahayakan manusia. (tin,ist/dya)



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/J/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG: SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO: IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Sepatu Stylish yang Nyaman Dipakai Ngabuburit Seharian

Ngabuburit dan buka bersama selalu menjadi momen spesial kala ramadan tiba. Tidak heran jika banyak orang ingin tampil rapi dan menarik saat berkumpul bersama teman atau keluarga. Memilih outfit yang nyaman sekaligus stylish menjadi hal yang penting agar bisa tampil percaya diri sepanjang acara.

Namun, bukan hanya pakaian yang perlu diperhatikan saat menyiapkan penampilan. Sepatu juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menunjang kenyamanan sekaligus melengkapi keseluruhan gaya. Pemilihan sepatu yang tepat dapat membantu seseorang bergerak lebih leluasa, terutama ketika harus berjalan cukup jauh.

berdiri lama, atau berpindah tempat selama acara berlangsung. Karena itu, sepatu yang dipilih sebaiknya mudah dipadukan dengan berbagai jenis outfit, memiliki bobot yang ringan saat dipakai, serta tidak membuat kaki cepat pegal atau menimbulkan lecet setelah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Agar outfit of the day (OOTD) bukber kamu tetap terlihat chic sekaligus praktis, penting untuk memilih jenis sepatu yang tidak hanya stylish tetapi juga nyaman digunakan.

Ada beberapa pilihan sepatu yang bisa menjadi andalan untuk melengkapi

penampilan saat acara buka bersama. Mulai dari sneakers yang memberikan kesan santai dan kasual hingga heels yang mampu menghadirkan sentuhan elegan, semuanya dapat menjadi pilihan tepat untuk menunjang gaya tanpa harus mengorbankan kenyamanan selama beraktivitas.

Sneakers Casual

Sneakers sering menjadi pilihan utama bagi kamu yang ingin tampil stylish tanpa mengorbankan kenyamanan. Sepatu ini biasanya memiliki sol yang empuk sehingga tetap nyaman dipakai, terutama ketika harus berdiri cukup lama atau berjalan selama acara buka bersama. Agar lebih mudah dipadukan dengan berbagai outfit, pilih sneakers dengan warna netral seperti hitam, putih, beige, atau abu-abu. Warna-warna ini tidak hanya terlihat simpel, tetapi juga membuat tampilan tetap chic dan cocok dipadukan dengan berbagai gaya pakaian.

Loafers yang Elegan

Loafers bisa menjadi pilihan tepat ketika kamu ingin tampil lebih rapi dan elegan. Model sepatu ini memberikan kesan chic sekaligus praktis, sehingga

cocok dipakai untuk acara santai maupun semi-formal seperti buka bersama.

Selain itu, desain loafers yang menutup bagian belakang kaki membuatnya lebih stabil dan nyaman saat digunakan berjalan cukup lama. Hal ini membantu mengurangi rasa pegal pada kaki, sehingga kamu tetap bisa beraktivitas dengan nyaman sepanjang acara.

Flat Shoes Stylish

Flat shoes bisa menjadi pilihan tepat untuk tampil effortless namun tetap fashionable. Sepatu tanpa hak ini terasa ringan saat dipakai dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis OOTD, mulai dari dress, rok, hingga celana panjang.

Agar penampilan terlihat lebih menarik, kamu bisa memilih flat shoes dengan detail kecil seperti pita atau aksesoris sederhana. Sentuhan ini akan memberikan kesan manis pada tampilan tanpa membuatnya terlihat berlebihan, sehingga tetap cocok untuk acara buka bersama.

Block Heels Modis

Block heels bisa menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin tampil lebih elegan, terutama jika acara buka bersama diadakan di tempat yang lebih fancy. Berbeda dengan jenis heels lainnya, block heels memiliki hak yang lebih tebal sehingga memberikan stabilitas yang lebih baik dan membantu mengurangi tekanan pada telapak kaki.

Karena itu, sepatu ini cenderung lebih nyaman dipakai dalam waktu yang cukup lama. Block heels juga mudah dipadukan dengan dress atau rok untuk menciptakan tampilan yang chic, elegan,

sekali-gus stylish saat menghadiri acara bukber.

Memilih sepatu yang tepat bisa menjadi salah satu kunci untuk menciptakan OOTD bukber yang chic sekaligus praktis. Karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara gaya dan kenyamanan, terutama saat menghadiri momen spesial bersama teman atau keluarga.

Sepatu yang nyaman tidak hanya melengkapi penampilan agar terlihat lebih stylish, tetapi juga membantu kamu tetap leluasa beraktivitas sepanjang acara. Dengan begitu, kamu bisa menikmati momen buka bersama dengan lebih nyaman tanpa harus khawatir kaki terasa pegal. (Itqiyah_mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini).



Sneakers Casual



Loafers yang Elegan



Flat Shoes Stylish



Block Heels Modis

MBG Lepas Kendali ...dari hal 1

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mengajukan hal uji materiil atau judicial review Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut difokuskan pada penganggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah dari sisi tata kelola fiskal.

Peneliti Celios sekaligus anggota dari MBG Watch, Jaya Darmawan, menyatakan pihaknya mengajukan gugatan karena menilai bahwa program MBG menimbulkan potensi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

"Kami melihat bahwa program [MBG] ini hingga detik ini menimbulkan apa yang disebutkan dengan kesewenang-wenangan fiskal. Karena hari ini, per hari ini, dolar itu atau rupiah itu sudah mencapai Rp17.000/US\$. Selain itu, harga minyak per barel itu sudah mencapai US\$104/barel," kata Jaya dalam konferensi persnya usai menyampaikan gugatan ke MK, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

"Dengan kondisi defisit fiskal yang berpotensi hingga 3% lebih, dan kesempitan ruang fiskal kita, saya kira MBG yang dipaksakan yang terus berjalan ini adalah perilaku yang sewenang-wenang," sambungnya.

Koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, antara lain Sayogyo Institute, ASPPUK, YLKI, YLBHI, Transparency International Indonesia (TII), hingga pemohon perseorangan seperti Busro Muqoddas dan Agus Sarwono tersebut menggugat sejumlah ketentuan dalam UU APBN 2026 yang dinilai memberi ruang diskresi terlalu besar dalam pengalokasian anggaran.

Perwakilan YLBHI, Muhamad Isnur, menyebut terdapat enam pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi, yakni: Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1).

"Enam pasal ini yang kami uji, sebagian kami minta tafsirkan secara inkonstitusional bersyarat, ada yang juga minta kami hapuskan. Karena apa? Misalnya ada frasa 'undang-undang ditetapkan pemerintah', bagaimana itu ketetapan pemerintah? Suka-suka Anda? Dasarnya Perpres [Peraturan Presiden]? Enggak bisa."

"Ada undang-undang, bagaimana membuat undang-undang. Ada undang-undang bagaimana membuat Undang-Undang APBN. Ada konstitusi yang bilang kalau mau buat pengaturan harus di undang-undang," tegasnya.



Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch mendaftarkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 terkait Program MBG ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (10/3/2026). Ist

Selain aspek konstitusionalitas, koalisi juga menyoroti potensi dampak fiskal dari program MBG yang memiliki anggaran besar dalam APBN.

Peneliti Celios sekaligus Koordinator MBG Watch, Media Askar Wahyudi menilai program tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap APBN, terutama jika harga minyak dunia terus meningkat akibat konflik geopolitik global.

"APBN itu adalah uang rakyat, uang negara kita. Yang harusnya diberikan kepada masyarakat. Tapi ketika negara sedang sulit, kita tahu MBG tetap jalan. Estimasi kami, potensi kerugian karena makanan yang terbuang per minggu itu mencapai Rp1,2 triliun," jelasnya.

Di samping itu, ia juga mengkritik efektivitas penyaluran program yang dinilai belum sepenuhnya menasar masyarakat miskin.

"Saya kasih gambaran, mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu Rp335 triliun. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat Rp361 ribu per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat Rp66 juta per keluarga per tahun."

"Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak Rp5,2 juta dari anggaran Rp335 triliun itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar Rp200 ribu rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima Rp5,2 juta per keluarga per bulan," tuurnya.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, koalisi MBG Watch ini berharap MK dapat segera memproses permohonan tersebut untuk memastikan pengelolaan anggaran negara tetap sesuai prinsip konstitusi, tata kelola yang baik, serta

kepentingan publik.

Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan program makan bergizi gratis alias MBG dalam APBN 2026 senilai Rp335 triliun dengan target penerima 82,9 juta. Nilai anggaran ini naik dibanding 2025 yang sebesar Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima.

Sejak awal tahun ini, anggaran jumbo bagi program ambisius Prabowo itu memang menuai kritik dari banyak kalangan lantaran hampir sepertiga alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah setidaknya 20% dari APBN diperuntukkan program MBG.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengatakan, pengajuan gugatan itu dilatarbelakangi kekhawatiran atas dampak yang muncul dari tata kelola MBG yang dinilai semakin tidak terkendali. Ia menyebut berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut telah menimbulkan dampak yang dirasakan masyarakat.

"Yang melatarbelakangi kami mendaftarkan JR ini adalah tragedi akibat tata kelola MBG yang semakin tidak terkontrol," kata Busyro di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan bahwa "dampak destruktif yang menyengsarakan masyarakat secara luas sudah kita rasakan."

Menurut Busyro, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, tetapi juga berpotensi merembet ke persoalan fiskal negara. Ia menilai dampak kebijakan tersebut dapat menjalar hingga aspek pengelolaan anggaran yang lebih luas.

Selain itu, Busyro mengingatkan bahwa kondisi tersebut bisa mencerminkan praktik birokrasi yang semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi jika tidak segera

dikoreksi. Dalam pandangannya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan apabila persoalan ini terus dibiarkan.

Ia menegaskan bahwa langkah menggugat UU APBN 2026 melalui Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk sikap konstitusional masyarakat sipil untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan mengawal kebijakan negara. Para pemohon memilih jalur hukum sebagai cara yang dianggap beradab untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

Busyro juga berharap para hakim konstitusi dapat memahami latar belakang serta aspirasi masyarakat yang melandasi pengajuan uji materi tersebut. Menurutnya, permohonan ini merupakan upaya menghadirkan keadilan dan menjaga ruang kritik yang konstruktif terhadap kebijakan negara.

Dia berharap dapat menangkap jeritan aspirasi masyarakat yang muncul dari berbagai persoalan dalam tata kelola program MBG.

Tanggapan Pemerintah

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi melakukan pemangkasan anggaran program MBG senilai Rp335 triliun tahun ini, apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit APBN 2026 melewati batas aman 3%.

Bendahara Negara menuturkan pemerintah telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US\$92/barel rata-rata per tahun akibat eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

Dari hasil simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila harga minyak berada di level tersebut sepanjang tahun.

Untuk mencegah defisit melebar, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara, salah satunya melalui efisiensi anggaran di sejumlah program, termasuk MBG.

"Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan penghematan anggaran tersebut tidak akan menyentuh anggaran utama program MBG, khususnya untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. (tin,ktn,kum,rls/dya)

22 WNI DARI IRAN TIBA DI INDONESIA 'SETIAP HARI TERDENGAR LEDAKAN'

Pemerintah memulangkan 22 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (10/3/2026) pukul 18.53 WIB. Tercatat ada 36 WNI lagi yang telah mendaftarkan diri untuk dievakuasi pada gelombang kedua.

Segar (58), seorang insinyur asal Kota Bumi, Kabupaten Tangerang, membagikan pengalamannya selama tinggal di Teheran, Iran, di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik negara tersebut dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Selama kurang lebih dua tahun menetap di sana, Segar mengaku nyaris setiap hari mendengar suara ledakan.

"Ya, hampir setiap hari. Daily bombing itu ada," ujar Segar saat ditemui usai tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (10/3/2026).

Menurut Segar, suara ledakan tersebut bisa terdengar kapan saja tanpa mengenal waktu. Dentuman keras dapat terjadi pada pagi, siang, hingga malam hari.

Ia bahkan beberapa kali terbangun



Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendampingi 22 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Iran tiba di kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa (10/3/2026) petang. (Ist)

dari tidur akibat suara ledakan yang cukup kuat.

"Sekitar jam 04.00 atau jam 06.00 pagi pernah terbangun karena suara ledakan," kata dia.

Segar menuturkan, lokasi ledakan dari tempat tinggalnya tergolong cukup dekat, yakni sekitar satu hingga dua kilometer. Dengan jarak yang relatif dekat itu, suara dentuman

terdengar sangat jelas dari tempat ia berada.

Situasi tersebut membuat kehidupan sehari-hari terasa tidak tenang dan sering kali diliputi rasa cemas.

Karena kondisi keamanan yang tidak menentu, Segar memutuskan untuk mengikuti proses evakuasi setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) membuka kloter pemulangan warga negara Indonesia (WNI) ke Tanah Air.

Ia mendaftarkan diri setelah menunggu selama tiga hari untuk mendapatkan kepastian informasi dari pihak KBRI terkait proses evakuasi tersebut.

"Waktu itu kami dipulangkan ke asrama sambil menunggu informasi dari KBRI," ujar Segar.

Ia menambahkan, sebagian WNI memilih meninggalkan Iran secara mandiri karena khawatir dengan situasi keamanan yang semakin memburuk. Namun, Segar memutuskan untuk tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah Indonesia.

"Lebih baik menunggu dari KBRI. Itu lebih aman, lebih terkoordinasi, dan lebih terjamin," kata dia.

Setelah melalui proses evakuasi, Segar akhirnya berhasil kembali ke Indonesia bersama sejumlah WNI lainnya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengatakan secara total ada 32 WNI yang dipulangkan pada gelombang pertama. Sebanyak 22 WNI tiba hari ini, dan sisanya akan tiba pada Rabu (11/3/2026) besok.

"Sore ini ada 22 warga negara kita yang kembali di gelombang pertama ini. Besok 10 lagi yang berasal dari Iran," kata Sugiono kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah itu, terdapat gelombang kedua kepulangan WNI dari Iran ke Indonesia. Sugiono menyebutkan telah ada 36 WNI yang mendaftar untuk pulang di gelombang kedua.

"Kemudian gelombang kedua saat ini per sore ini sudah ada 36 yang mendaftarkan diri untuk bisa direpatriasi ke tanah air dari Iran," ucap Sugiono.

Sugiono belum menyebutkan kapan gelombang kedua ini akan dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaannya mengacu pada situasi.

"Kapannya, ya nanti. Itu kan ada beberapa hal ya, beberapa faktor. Situasi di Teheran sendiri, kemudian situasi perbatasannya, situasi negara berikutnya yang kita tuju. Mudah-mudahan ya dalam minggu ini," ucap Sugiono. Sugiono mengatakan kepulangan ke Indonesia bagi WNI di Iran ini bersifat sukarela bergantung pada WNI itu sendiri. Sebab, kata Sugiono, sebenarnya kondisi di Iran relatif terkontrol. (wid,rls,ant/dya)

TRUMP ISYARATKAN AKHIRI PERANG



Ribuan warga berkumpul untuk menyatakan dukungan terhadap pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei di Teheran, Iran, Senin (9/3/2026). (reuters.ist)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan sinyal kuat bahwa agresi militer negaranya terhadap Iran berpotensi segera berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berada di Florida, dengan menyebut operasi militer yang telah berlangsung selama sekitar sepuluh hari berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Meski menghadapi tekanan internasional yang cukup besar serta fluktuasi harga minyak dunia, Trump

menegaskan bahwa tujuan utama operasi militer tersebut adalah untuk menekan harga energi bagi masyarakat Amerika Serikat.

Dalam konferensi pers terbaru, Trump mengklaim pasukan Amerika Serikat telah menyerang sedikitnya 5.000 target di wilayah Iran. Ia menyebut serangan itu berhasil m e l u m p u h k a n kemampuan sistem rudal milik Iran.

Selain operasi udara dan darat, Trump juga menyatakan bahwa armada laut Amerika Serikat telah menenggelamkan lebih dari 50 kapal milik Iran selama operasi berlangsung.

"Kami telah melakukannya. Kami membawa harga minyak menjadi sangat rendah. Ini hanyalah sebuah perjalanan menuju sesuatu yang harus diselesaikan, dan kita sudah sangat dekat untuk mengakhirinya juga," ujar Trump dikutip Selasa (10/3/2026).

Gedung Putih kini mulai

menunjukkan keterbukaan untuk mengakhiri agresi tersebut. Meski demikian, Amerika Serikat tetap memberikan peringatan keras bahwa serangan terhadap fasilitas vital Iran, termasuk infrastruktur produksi listrik, masih mungkin dilakukan jika Teheran tidak menyerah.

Di sisi lain, situasi di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda dari klaim Washington. Meski Amerika Serikat menyebut kemampuan rudal Iran telah lumpuh, laporan terbaru menyebut Iran masih terus meluncurkan rudal andalannya ke sejumlah target militer Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintah Iran pun menegaskan tidak akan menyerah di bawah ancaman maupun tekanan militer dari pihak mana pun.

Sebagai langkah untuk meminimalisir dampak konflik di kawasan Teluk, pemerintah Amerika Serikat juga menawarkan asuransi risiko politik (political risk insurance) bagi kapal tanker yang beroperasi di wilayah tersebut. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas distribusi energi global yang sempat terganggu akibat konflik militer. (tin,jaz,rtr,ist/dya)